

BAB I

PEDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karena itu zakat bukan hanya bertujuan untuk beribadah saja tetapi juga untuk melakukan tindakan sosial bagi sesama manusia. Agar dana zakat dapat berguna maka perlu adanya pengelolaan zakat yang sesuai dengan peraturan yang ada dan secara professional. Karena sangat pentingnya pemerataan untuk pengalokasian dana zakat tersebut maka harus dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai tanggung jawab, kemampuan manajerial, pengetahuan agamaserta keterampilan teknis. Agar zakat dapat tersalurkan pada

orang yang benar-benar wajib menerimanya serta memiliki nilai fungsi sosial yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi umat.

Organisasi pengelola zakat mempunyai tugas mengelola zakat memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah menjalankan kinerjanya. Laporan keuangan juga termasuk salah satu media antara pengelola dengan masyarakat, dan sebagai transparansi kepada masyarakat maupun kepada donatur atau pengguna laporan keuangan lainnya.

Dapat kita ketahui bahwa laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan yang berbeda-beda. Pihak-pihak tersebut antara lain manajemen perusahaan itu sendiri, kreditur yang memberi kredit (pinjaman), calon investor yang sedang mempertimbangkan investasi yang akan ia lakukan, pemerintah yang akan memungut pajak dan pihak-pihak lainnya.

Oleh karena itu diperlukan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai pedoman bagi para akuntan di dalam menyusun laporan keuangan. Demikian para pemakai laporan

keuangan dapat membandingkan kondisi keuangan dan hasil operasi antar perusahaan (Al. Haryono Jusup, 2001:16).

Dalam akuntansi syariah memiliki landasan utama, yaitu landasan syariah yang bersumber pada Al Qur'an, Al Hadist dan Fatwah Syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhak (Dewan Syariah Nasional). Oleh karena itu seluruh ketentuan akuntansi yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak boleh dipergunakan. Hal ini dapat dilihat dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) paragraf 128 yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak

penghasilan), dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

2. Biaya kini (*current cost*). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.
3. Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Dari ketentuan tersebut terdapat suatu pengukuran yang dilakukan untuk laporan keuangan konvensional tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada laporan keuangan syariah.

Berbeda dengan prinsip laporan keuangan pada umumnya, prinsip laporan keuangan syariah pemakai laporan keuangan syariah meliputi investor, pemilik dana (*qardh*); pemilik dana investasi *mudharabah*; pemilik dana titipan; pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat.

Manajemen entitas syariah memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun bagaimanapun juga laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. (Wiroso 2010; 22-23).

Pembuatan laporan keuangan syariah juga harus berpedoman pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya menurut akuntansi harus mampu untuk mengikuti perkembangan Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia adalah LAZISMU Surabaaya, merupakan salah satu lembaga penyalur zakat, infaq, dan shodaqoh. Dimana dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh juga memerlukan adanya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan yang ada guna memenuhi informasi bagi pihak-pihak luar seperti para donatur, pemerintahan, maupun untuk manajemen perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu untuk menyusun laporan keuangan yang benar diperlukan pedoman yang tepat yaitu terdapat dalam PSAK Nomor 109.

PSAK Nomor 109 disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai bagian dari penyempurna transaksi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada organisasi pengelola zakat, serta mengatur bagaimana **pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq dan shodaqoh, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amil zakat.**

Menurut latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada LAZISMU Surabaya, tentang penerapan laporan keuangan syariah yang berpedoman pada PSAK 109, dengan judul penelitian **PENERAPAN PASAK 109 DAN KAITANNYA DENGAN LAPORAN KEUANGAN PADA LAZISMU SURABAYA.**

B. RUMUSAN MASALAH

Seperti yang dikemukakan dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu : “apakah laporan keuangan pada Lazizmu Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK 109?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui penerapan laporan keuangan Lazizmu Surabaya sudah sesuai dengan pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Lazizmu Surabaya

Dapat digunakan sebagai koreksi atau masukan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang berlatar belakang syariah

2. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan serta pengetahuan tentang ilmu khususnya pada pembuatan serta pangakuan, pengukuran serta penyajian laporan keuangan.

3. Bagi pihak lain, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi penelitian khususnya bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

E. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memudahkan pembahasan maka penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu :

a. BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang mendasari penyusunan skripsi ini, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika skripsi.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang sumber-sumber teori yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dan relevan dengan permasalahan, teori-

teori tersebut dapat diperoleh melalui 10ating10ure-literatur yang ada baik diperoleh dalam perkuliahan maupun sumber-sumber lain, penelitian sebelumnya, model analisis yang digunakan.

c. BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian sebagai dasar pelaksanaan penelitian tentang laporan keuangan, pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus.